

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metode Penelitian	25
1.7 Sistematika Penulisan	28
BAB II KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP ORGANISASI BANTUAN HUKUM	30
2.1 Pengawasan Profesi Advokat Oleh Pemerintah	31
2.2 Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	

Terhadap Organisasi Bantuan Hukum	40
BAB III PENGAWASAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PROFESI ADVOKAT	51
3.1 Kemandirian Profesi Advokat	51
3.2. Hubungan Hukum Profesi Advokat Dengan OBH	55
3.3. OBH Tidak Bertentangan Dengan Profesi Advokat	64
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	75
DAFTAR BACAAN	